
Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah

¹Aisyah

Email: aisyahkhalik@gmail.com

Dikirim: 29 Januari 2021

| Diterima: 24 Februari 2021

| Dipublikasikan: 28 Februari 2021

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance*, akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian jenis deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini sejumlah \pm 50 orang yang bekerja dalam lingkup Biro Pengelolaan Barang dan Aset Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan metode kuesioner (data primer) yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah daerah

Kata Kunci

Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Aset Tetap, Good Governance.

¹ Aisyah adalah PNS di Provinsi Sulawesi Selatan. Email: aisyahkhalik@gmail.com

PENGARUH GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diusulkan dengan pertimbangan bahwa efisiensi dan efektivitas pada penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah itu sendiri. Akan tetapi karena tidak adanya kesesuaian dengan ketatanegaraan, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah maka undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU. 23 Tahun 2014 memberikan pemerintah daerah otonomi tersendiri hingga pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam daerahnya sendiri.

Perubahan undang-undang tersebut mengimplikasikan bahwa pemerintah terus mengkaji dan berusaha memperbaiki kinerjanya terutama dalam hal pemerintahan daerah. Pemerintah juga berupaya untuk memaksimalkan potensi pada suatu daerah serta meminimalkan terjadinya ketimpangan juga di daerah tersebut. Perubahan tersebut juga bisa mengindikasikan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahannya.

Tata kelola pemerintahan yang baik dikenal juga dengan istilah *good governance*. Istilah *Good governance* mulai muncul di Indonesia pada sekitaran tahun 1998 akan tetapi konsep *good governance* sudah muncul pada abad ke 20 di dunia bagian barat. *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang dianggap oleh dunia sebagai cara paling efektif untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Konsep yang dianggap dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan semestinya.

Aset pada pemerintahan daerah biasa disebut dengan barang milik daerah. Pengertian barang milik daerah menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 merupakan semua barang yang diperoleh/dibeli atas beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun perolehan dari sumber lainnya yang sah. Dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah merupakan sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah. Pengertian barang milik daerah ini sejalan dengan pengertian aset.

Aset pada pemerintah daerah terkadang menjadi masalah yang ditemukan ketika mengaudit suatu daerah. Dimuat dalam Rakyatku News yang menuliskan bahwa BPK RI menyayangkan temuannya tentang aset Pemprov Sulsel yang tidak dikelola dengan baik bahkan dikuasai pihak ketiga, dan masih terus terulang dari tahun sebelumnya. Catatan BPK tahun 2018 tentang aset Pemprov Sulsel tersebut tapi belum ditindaklanjuti dengan baik. (Rakyatku News, 15 Mei 2018). Pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah masih sering ditemukan di berbagai daerah. Contohnya seperti di Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id tentang penahanan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan atas tuduhan penyewaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yaitu gedung PWI di Jl Andi Pangeran Pettarani yang disewakan tanpa sepengetahuan Pemprov Sulsel selaku pemilik gedung dan tidak memberikan hasil kepada pemilik aset atau tidak menyetorkan keuntungan kepada pihak pemilik. (Republika.co.id, 13 September 2017). Masalah-masalah pengelolaan aset tersebut merupakan hal yang seharusnya bisa ditangani secara dini untuk meminimalkan risiko-risiko yang akan merugikan suatu daerah.

Permasalahan pada pengelolaan aset terutama dalam subsistem-nya merupakan hal yang amat perlu ditangani. Pengoptimalan pengelolaan aset merupakan tindakan yang dapat menangani hal tersebut, tetapi optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah adalah masalah yang juga yang kerap ditemukan di beberapa daerah. Beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai pengelolaan aset, penilaian aset dan pengadaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah dalam bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat pada segala tindakan serta kebijakan yang ditetapkan (Mardiasmo 2002:18). Teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Jefri (2018:19) didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Pertanggungjawaban pada kegiatan yang dilakukan individu di pekerjaannya memberikan pengaruh dalam kepentingan jangka panjang kelompok. Teori tersebut dapat mendukung pegawai atau aparatur pemerintah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan aset utamanya aset tetap yang dapat dipertanggungjawabkan demi keberlangsungan instansi terkait. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan sebagai:

H1: Penerapan akuntabilitas berpengaruh signifikan pada pengelolaan aset tetap pemerintah daerah

Transparansi dalam proses perumusan kebijakan publik serta implementasinya merupakan sifat dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pristiani dan Amir (2016:2) menggambarkan *stewardship theory* sebagai situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan dalam organisasi. Jika di tempatkan pada sektor publik maka kepala OPD selaku manajemen memiliki peran pada tujuan organisasinya yang kemudian bisa dicapai jika informasi yang benar, transparan, dan terarah dengan baik kepada keseluruhan staf/pegawai. Locke dalam Sari (2016:120) berpendapat bahwa penetapan pada tujuan yang baik adalah penetapan tujuan yang sesuai serta konsisten dari tingkat atas sampai

tingkat bawah. Penetapan tujuan tersebut dapat terwujud jika informasi tentang tujuan organisasi tersebar secara menyeluruh dan dapat dimengerti oleh pegawai di tingkat atas sampai dengan tingkat bawah pada organisasi. Transparansi sangat berperan penting pada penetapan tujuan organisasi. Maka berdasarkan teori yang telah dijabarkan, hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan sebagai:

H2: Penerapan transparansi berpengaruh signifikan pada pengelolaan aset tetap pemerintah daerah

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menunjukkan seberapa besar hubungan dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan aset tetap dan juga mencari tahu sejauh mana *good governance* telah ditetapkan pada pemerintahan daerah dengan menggunakan data-data yang akan dikumpulkan kemudian diolah berdasarkan teori yang ada. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *good governance* dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai indikatornya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset tetap.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan semua unit yang bekerja pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Pengelolaan Barang dan Aset Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 3 sub bagian yaitu 1) bagian penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan, 2) bagian tata usaha, perencanaan dan standarisasi, dan 3) bagian pengamanan, pemeliharaan dan persediaan. Jumlah keseluruhan populasi adalah 70 orang. Setelah dikalkulasikan ke dalam rumus maka diperoleh total 47,5 yang kemudian dibulatkan menjadi 50, dengan demikian maka total sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang.

3.3 Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode analisis statistik yang dibantu dengan aplikasi SPSS. Analisis statistik yang akan digunakan adalah analisis statistik dengan metode regresi *linear* berganda. Pengujian kualitas data menggunakan uji reabilitas dan uji validitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Simultan (uji F), Uji Parsial (Uji T) dan Koefisien Determinasi (R^2).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{Pengelolaan aset tetap} = 12,157 + (0,297) X_1 + (0,342) X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dilihat nilai konstanta sebesar 12,157 positif menunjukkan pengaruh positif variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi), hal ini berarti setiap kenaikan dari variabel bebas atau pengaruh dalam satu satuan maka variabel pengelolaan aset tetap akan naik. Nilai koefisien regresi dari variabel akuntabilitas (X_1) terhadap pengelolaan aset tetap (Y) positif senilai 0,297 yang berarti hubungan variabel akuntabilitas dan variabel pengelolaan aset tetap adalah positif. Setiap kenaikan satu satuan dari variabel akuntabilitas maka variabel pengelolaan aset akan mengalami peningkatan sebesar 0,297 atau sebesar 29,7%. Nilai koefisien regresi pada variabel transparansi (X_2) terhadap variabel pengelolaan aset tetap (Y) adalah positif 0,342 yang berarti variabel transparansi dan variabel pengelolaan aset tetap berhubungan positif. Kenaikan satu satuan pada variabel transparansi akan menaikkan variabel pengelolaan aset tetap sebesar 0,342 atau 34,2%.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Aset Tetap

Uji statistik dalam pengujian hipotesis pada variabel akuntabilitas (X_2) menemukan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,006 dan nilai t_{hitung} 2,941 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan aset tetap yang bersifat positif. Hipotesis kedua diterima karena nilai koefisien regresi dari akuntabilitas $< 0,005$ dan nilai t_{hitung} yang lebih besar t_{tabel} yaitu 0,2030. Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan aset tetap.

Pada sektor publik terdapat pertanggungjawaban pada setiap periode dengan tujuan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan telah mencapai target atau belum. Sifat manusia yang bertanggungjawab disebutkan pada teori *stewardship* yang sangat mendukung penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan individu di pekerjaannya memberikan pengaruh dalam kepentingan jangka panjang kelompok. Teori ini dapat mendukung pegawai/aparatur pemerintah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan aset tetap yang dapat dipertanggungjawabkan demi keberlangsungan instansi terkait.

Penerapan akuntabilitas yang mendukung oleh teori *stewardship* dalam pengelolaan aset tetap dapat meningkatkan kinerja dari pengelolaan aset tetap. Penerapan akuntabilitas juga dapat menghindarkan dari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaan aset daerah yang bersifat merugikan suatu daerah. Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap terdapat pada hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Aset Tetap

Nilai koefisien regresi variabel transparansi adalah positif 0,02 dan nilai t_{hitung} 3,264 pada uji statistik dalam uji hipotesis. Nilai sig. lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} yang lebih besar t_{tabel} sebesar 0,2030 membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang bersifat positif pada variabel transparansi terhadap pengelolaan aset tetap, maka hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa transparansi berhubungan positif signifikan secara parsial terhadap pengelolaan aset tetap.

Teori *stewardship* menurut Pristiani dan Amir (2016:2) menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Jika di tempatkan pada sektor publik maka kepala OPD selaku manajemen memiliki andil dalam tujuan organisasinya yang hanya bisa dicapai apabila informasi yang benar, transparan, dan terarah dengan baik kepada setiap staf/pegawai yang ada. Pemahaman tentang tujuan organisasi dalam hal ini pengelolaan aset tetap akan memberikan efek positif dan menghindarkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan teori *stewardship* dan teori penetapan tujuan pada transparansi dapat sangat mendukung dalam peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah. Transparansi informasi dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki anggapan buruk di masyarakat tentang pemerintahan yang tidak terlepas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di dalamnya. Dengan transparansi maka masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang sudah dikerjakan pemerintah dan juga mengawasi serta memberi masukan untuk pemerintahan agar memperbaiki sesuatunya tidak berjalan dengan semestinya.

Hubungan transparansi dalam pengelolaan aset memiliki hubungan sangat erat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dijelaskan dalam hipotesis ketiga. Pernyataan dalam hipotesis ketiga adalah transparansi berhubungan positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan pada pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari setiap peningkatan yang terjadi pada variabel-variabel tersebut membuat peningkatan terhadap pengelolaan aset tetap. Begitupun jika terjadi penurunan pada variabel-variabel tersebut maka akan menimbulkan penurunan pada pengelolaan aset tetap.

Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya agar memakai metode lain dengan menambahkan beberapa populasi dan objek penelitian untuk mendapatkan data yang beragam serta akurat dan menambahkan variabel lain untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Auditya, Lucy dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 1:21-4.1

- Auliarahma dan Titis Puspitaningrum Dewi Kartika. 2014. The Effect of Good Governance on The Success of The Implementation of Performance-Based Budgeting in Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*, 2: 107-114.
- Awaludin, Iwan dkk. 2018. Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2: 174-186.
- Azlim dkk. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1: 1-14.
- Hastuti, Hilda Sri. 2017. *Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Hendrik, Marukan dkk. 2018. Assessing The Influence Of Leadership On The Implementation Of Good Governance In A New Autonomous Region. *Public Administration Issues: Special Issues II*.
- Jefri, rini. 2018. Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4: 14-28.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1: 1-9.
- Locke, Edwin. A dkk. 1981. Goal Setting and Task Performance: 1969-1980. *Psychological Bulletin*, 1:125-152.
- Majid, Rozaiha Ab dkk. 2014. Misappropriation of assets in local authorities: A challenge to good governance. *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 164 : 345-350.
- Mardiasmo. 2002a. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulalinda, Veronika dan Steven J. Tangkuman. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*, 1: 521-531.
- Mulyadi dan Romda. 2018. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Perizinan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 2:14-19.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Octariani, Devie. 2016. The Effects of Implementation Of Good Governance, Performance Based Budgeting, and Human Resources To Budget Qualities. *Proceeding ICSGPSC*, 1:81-97
- Ovine Piri, Triski. 2016. Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal EMBA*, 1: 1008-1019.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2: 37-46.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Safaruddin dkk. 2018. Efektivitas Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1: 40-55.
- Said, Jamaliah dkk. 2016. Relationship between Good Governance and Integrity System: Empirical Study on the Public Sector of Malaysia. *Humanomics*, 2: 151-171.
- Sari, Martdian Ratna. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Faktor Organisasional, dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2:117-14.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wonggow, Alan. 2014. Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal EMBA*, 1 : 582-593.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 1: 52-62